

Daftar Pustaka

BUKU

Hartoko Agus. 2022. Universitas Diponegoro, artikel “*Analisa Fungsi Ekosistem Area Perlindungan Laut (APL) di Taman Nasional Kepulauan Seribu*”, Pasuruan

Marpaung Anna. 2022. Jurnal IBLAM Law Review, Jakarta, menganalisis Putusan No. 321/Pid.Sus/2021 yang mengadili penggunaan bom ikan di laut,

Santosa Achmad. 2001. *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta,

D. M. Alongi. 2012. *Mangrove Forests: Resilience, Protection and Management*

Andi Hamzah. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Satria, Arif. 2015. *Politik Kelautan dan Perikanan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hadis, Baehaki. 2023. *Pengertian Perlindungan Hukum*, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk,

Clayton, S. 2015. *Conservation Psychology*. Oxford: Wiley-Blackwell..

Campbell. 2016. et al. *Biologi*. Jakarta: Erlangga

Derraik, 2002. *The Pollution of the Marine Environment by Plastic Debris*. Marine Pollution Bulletin,

Dahuri, 2003. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita,

Fandeli, Chafid. 2002. *Pariwisata Berbasis Ekologi*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan UGM.

R. Dahuri, 2004. *Keanekaragaman Hayati Laut*, Jakarta: Gramedia.

Falkowski. 1998. *“The Role of Phytoplankton in Global Biogeochemical Cycles.* Science,

Hilborn, R. 2004. *“Rebuilding Global Fisheries.”* Science.

Haryono, Somun, 2014, *,Pelestari perairanan di kepulauan seribu,Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan*
Bandung

Kelleher, G.1999. *Guidelines for Marine Protected Areas.* Gland: IUCN.

Kusnadi. 2000 *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan, Jakarta: LP3ES.*

Kusnadi. 2009. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial,* Yogyakarta: LKiS,

Manullang E.fernando M, 2007 , *Menggapai hukum berkeadilan,* buku kompas,Jakarta

Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia,* Bandung: Refika Aditama.

Mann, K. H. & Lazier, J. R. N. 2006. *Dynamics of Marine Ecosystems.* Oxford: Blackwell.

Masdin. 2016. *Implementasi Ketentuan UNCLOS 1982 terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut di Indonesia,* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol. 4 .

Mutia Ismi Febrianti. 2022. Universitas Diponegoro,artikel *“Analisa Fungsi Ekosistem Area Perlindungan Laut (APL) di Taman Nasional Kepulauan Seribu ,*Pasuruan

Meisha Poetri Perdana. 2021. Banten,*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Ekosistem Laut.* Bandung

Nur Hasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan,* Pendekatan Ekonomi

Nybakken, J. W. 2022. *Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis*. Jakarta: Gramedia.

Nybakken, J. W. 2023. *Marine Biology: An Ecological Approach*, Harper & Row.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu,

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana,

Putri & Simanjuntak. 2025. *pengertian Kepastian Hukum*, *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*,

Simanjuntak Putri. 2025. *pengertian Kepastian Hukum*, *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*,

Satjipto Rahardjo. 2000 *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,)

Satjipto Rahardjo..2006. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa,

Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Sudrajat, A. 2010. *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suharsono. 2014. *Terumbu Karang Indonesia*, LIPI Press, Jakarta,

Satria, Ahmad. 2015. *Politik Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Takdir Rahmadi, 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tomascik, 1997. T. et al. *The Ecology of the Indonesian Seas*. Singapore: Periplus.

Utrecht, 1989. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.

JURNAL HUKUM

Natalia Yeti Puspita et al. – Indonesia's Responsibility for Coral Reef Damage in Kepulauan Seribu Jurnal ini membahas tanggung jawab negara atas kerusakan terumbu karang di Kepulauan Seribu meninjau hukum internasional konservasi keanekaragaman hayati.

Patricia Bela Simanjuntak – Analisis Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 sebagai Bentuk Perlindungan dan Pelestarian Ekosistem Laut (Jurnal Jendela Hukum) Menganalisis PP 26/2023 tentang pengelolaan sedimentasi laut sebagai bentuk upaya perlindungan dan pelestarian ekosistem laut.

Urgensi Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang di Indonesia – Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Studi normatif mengenai urgensi perlindungan terumbu karang dan regulasi hukum lingkungan laut di Indonesia.

Diki Okta Dwi Putra – Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Sumber Daya Laut Terumbu Karang di Indonesia (Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum) Analisis kerangka hukum nasional terhadap pemanfaatan dan perlindungan terumbu karang.

Endah & Haryanto – *Strategi Perlindungan Ekosistem Pesisir Berbasis Hukum Nasional* (Jurnal Hukum dan Pembangunan) Mengulas strategi perlindungan ekosistem pesisir yang relevan untuk kerangka hukum laut.

A Rahman & Nur Azizah Maruf – Regulations on Protection of Fishermen's Rights and the Environment in Reclamation Projects in Indonesia (Mendapo: Journal of Administrative Law) Analisis regulasi hak nelayan dan lingkungan

dalam proyek reklamasi laut di Indonesia (relevan dengan putusan PTUN reklamasi).

Arifin, Z. *“Konsep Perlindungan Hukum atas Sumber Daya Laut dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia”*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 47 No. 2 (2017): 210-228.

Putra, A., & Rahmawati, L. *“Perlindungan Ekosistem Laut di Kawasan Pesisir: Tinjauan Hukum Lingkungan di Indonesia”*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1 (2019): 55-72.

Santoso, D. *“Implementasi Putusan PTUN dalam Pengawasan Lingkungan: Studi Kasus Kawasan Strategis Nasional”*, Jurnal Tata Laksana Negara, Vol. 12 No. 3 (2020): 98-115.

Adi, R. *“Hak Atas Lingkungan Hidup yang Sehat dalam Sistem Hukum Indonesia”*, Hukumonline, diakses pada 2025.

WWF Indonesia (, Tekanan Ekologis pada Ekosistem Pesisir dan Laut di Indonesia, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Internet

Badan Informasi Publik. *Putusan PTUN Jakarta No. 13/G/2016/PTUN-JKT*, tersedia secara daring di portal putusan peradilan (diakses 2025).

Nugroho, T. “*Perlindungan Ekosistem Laut di Indonesia: Tantangan dan Peluang*”, Academia.edu (diakses 2025).